

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF WOMEN'S EMPOWERMENT POLICY IN THE POLITICAL FIELD IN BATANG HARI DISTRICT

The implementation of women's empowerment policies in the political field in a region should be carried out well. The DPRD can make efforts to support the success of this policy because it has the function of making regulations, a budget function and a supervisory function. The Batang Hari Regency DPRD's efforts to increase women's representation in the political field can be seen from the existence of Regional Regulation no. 09 of 2020 concerning Women's Protection and budgeting which has been approved by the DPRD for women's empowerment. However, supervision in these regulations, especially in the political sector, is still weak. This research uses descriptive qualitative methods with in-depth interviews. The data processing techniques used include data reduction, data analysis using Nvivo coding, and drawing conclusions. The theory used in this research is gender theory according to Mansour Fakih and policy implementation theory according to Merilee S. Grindle: interests affected and type of benefits, program implementors, power, interests and strategies of actors involved, institutions and regime characteristics. The research results show that the implementation of women's empowerment policies in the political field in Batang Hari Regency has not been optimal enough. This was marked by two empowerments in the political field carried out by the P3AP2KB Service, but still only involving female political party members. Weak coordination between the P3AP2KB Service and Kesbangpol can be seen from the lack of coordination function in this field which emphasizes the need for a regent's decree. Optimizing the functions of each institution is necessary so that the implementation of this empowerment can be carried out well.

Keywords: Implementation, Women's Empowerment, Efforts

INTISARI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK DI KABUPATEN BATANG HARI

Implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang politik pada suatu daerah seharusnya terlaksana dengan baik. DPRD dapat melakukan upaya untuk menunjang keberhasilan kebijakan tersebut karena memiliki fungsi membuat peraturan, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Upaya DPRD Kabupaten Batang Hari untuk meningkatkan representasi perempuan di bidang politik terlihat dari adanya Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan serta penganggaran yang telah disetujui DPRD untuk pemberdayaan perempuan. Namun, pengawasan dalam perda tersebut, khususnya di bidang politik, masih lemah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam. Teknik pengolahan data yang digunakan meliputi reduksi data, analisis data menggunakan pengkodean Nvivo, serta penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gender menurut Mansour Fakih dan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle: *interest affected and type of benefit, program implementors, power, interests and strategies of actors involved, institution and regime characteristics*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang politik di Kabupaten Batang Hari belum cukup optimal. Hal ini ditandai dengan dua kali pemberdayaan di bidang politik yang dilakukan oleh Dinas P3AP2KB, tetapi masih hanya pada anggota perempuan partai politik. Lemahnya koordinasi antara Dinas P3AP2KB dan Kesbangpol terlihat dari fungsi koordinasi belum berjalan baik dalam bidang ini yang menitik beratkan kebutuhan akan SK bupati. Optimalisasi fungsi masing-masing lembaga diperlukan agar implementasi pemberdayaan ini dapat terlaksana dengan baik.

Katakunci: Implementasi, Pemberdayaan Perempuan, Upaya